



resmi Buku PDRB Kabupaten yang berisi informasi-informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB Per Kapita, Inflasi, Ketimpangan (Distribusi) Pendapatan, dan lain-lain.

2.4.21 Persandian

Persandian terkait dengan:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.

2.4.22 Kebudayaan

Di dalam urusan Kebudayaan, pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan kegiatan:

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Pencapaian atas kegiatan kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.96
Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Tapin 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya	-	11	12	15	16

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, penyelenggaraan seni dan budaya terus meningkat selama periode tahun 2012-2016. Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 11 kali di tahun 2013 dan meningkat menjadi 16 kali di tahun 2016.



Tabel 2.97
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	-	4	4	4	5

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, sarana penyelenggaraan seni dan budaya hanya bertambah 1 sarana selama periode tahun 2012-2016.

Tabel 2.98
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	-	22	22	22	22

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tidak mengalami perubahan selama periode tahun 2012-2016.

2.4.23 Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagaipenunjang kelangsungan pendidikan.

1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.



Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagaipenunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Berdasarkan data periode 2012-2016, pengunjung perpustakaan terendah sebesar 12,391 orang di tahun 2012, tertinggi sebesar 40,426 orang di tahun 2013.

Tabel 2.99
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah	12,391	40,426	13,336	17,234	20,337

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Untuk menghitung jumlah perpustakaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.100
Jumlah Perpustakaan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012 -2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Perpustakaan	46	88	88	88	88

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013,2014, 2015, 2016



Data jumlah perpustakaan beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang sama selama periode 2014 sampai dengan 2016, yaitu 88 perpustakaan. Jumlah perpustakaan terendah sebanyak 46 unit di tahun 2012.

2.4.24 Kearsipan

Pengelolaan Arsip secara baku adalah pengelolaan arsip yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara nasional;
2. menyediakan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan aturan yang ada;
4. melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.



C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.25 Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya yang dijual saja tetapi termasuk juga yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olah raga atau rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budidaya.

Produksi perikanan rawa berdasarkan data BPS menunjukkan kenaikan produksi perikanan dari 1.642,20 ton tahun 2012 menjadi 1.762,90 ton di tahun 2016. Adapun untuk perikanan sungai mengalami kenaikan dari 2.892,10 ton di tahun 2012 menjadi 3.272,90 ton di tahun 2016. Produksi perikanan di Kabupaten Tapin selama tahun 2012-2016 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.101
Produksi Perikanan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Produksi Ikan (ton)					
-Perikanan Rawa	1,642.20	1,694.30	1,717.70	1,730.20	1,762.90
-Perikanan Sungai	2,892.10	2,970.60	2,997.40	3,063.50	3,272.90
Total	4,534.30	4,664.90	4,715.10	4,793.70	5,035.80

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Tapin terbukti cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan pada tabel 2.92 bahwa persentase konsumsi ikan



terhadap target mampu di atas angka 90 persen selama periode tahun 2012-2016.

Tabel 2.102
Konsumsi Ikan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita)	-	49.58	51.45	51.45	52.73
2	Target Daerah (kg/kapita)	-	49.50	51.25	51.25	53.10
3	Persentase	-	100,16	100,39	100,39	99,30

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2.4.26 Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan di Tapin untuk mendorong pembangunan dan perekonomian daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan pariwisata yaitu jumlah kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tapin selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Kunjungan Wisatawan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Wisatawan	350,550	362,563	362,563	428,662	428,662

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Jumlah wisatawan ke Kabupaten Tapin selama tahun 2012-2016 masih berfluktuasi. Jumlah wisatawan terendah sebesar 350,550 orang di tahun 2012, tertinggi sebesar 428,662 orang di tahun 2015 dan 2016.

2.4.27 Pertanian

1. Produktivitas Padi

Produktivitas padi menggambarkan tingkat produksi padi dibagi dengan luasan areal tanam padi. Produktivitas menggambarkan upaya pemanfaatan



lahan untuk bercocok tanam padi. Produktivitas padi di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.104
Produktivitas Padi
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Padi (ton)	285,410	309,639	287,576	380,340	391,698
2	Luas Panen Padi (ha)	63,665	63,119	60,396	64,206	75,292
3	Rata-rata Produksi (kw/ha)	44,83	47,57	47,62	59,23	52,02

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Berdasarkan tabel di atas rata-rata produksi padi selama periode tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Produktifitas padi tertinggi sebesar 59,23 kw/ha di tahun 2015, terendah sebesar 44,57 kw/ha di tahun 2013.

2. Produktivitas Karet

Produktivitas karet di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi turun dan naik. Produktifitas karet tertinggi sebesar 720,40 kg/ha di tahun 2013, terendah sebesar 518,00 kg/ha di tahun 2012. Data series produktivitas Karet di Kabupaten Tapin tahun 2013-2016 disajikan di tabel berikut ini.

Tabel 2.105
Produktivitas Karet
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Karet (kg)	10,038,000	100,382,051	7,470,444	6,814,058	7,881,594
2	Rata-rata Produksi (kg/ha)	518,00	720,40	596,01	530,65	594,50

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017

2.4.28 Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui



batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Sub urusan perdagangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen.

2.4.29 Perindustrian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, definisi dari industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Sub urusan perindustrian sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri nasional.

2.4.30 Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk pemeratakan persebaran penduduk terutama di wilayah Indonesia yang luas. Pemerintah membekali terlebih dahulu para calon transmigran terkait cara mengelola lahan dan mengembangkan wilayah transmigrasi melalui pelatihan/kursus. Kegiatan yang memang ditujukan untuk program transmigrasi adalah kegiatan di sektor pertanian dan dengan sasaran pokok program yaitu pengembangan wilayah dan pembangunan permukiman.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.31 Perencanaan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan:

1. RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA



2. RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
3. RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ketiga dokumen di atas ada di Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dengan PERDA (untuk RPJPD dan RPJMD) dan ditetapkan dengan PERKADA (untuk RKPD setiap tahun).

2.4.32 Keuangan

1. Penetapan APBD

Penetapan APBD Kabupaten Tapin selama tahun 2012-2016 selalu dapat dilakukan secara tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan terbangunnya tertib administrasi dan keuangan di Kabupaten Tapin. Penetapan APBD dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 2.106
Penetapan APBD
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tapin Tahun 2017

2.4.33 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang terkait Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan antara lain: merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah, merumuskan kebijaksanaan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil daerah.

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Tapin yang memenuhi standar kompetensi untuk eselon IV ke atas dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.107
Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase ASN eselon IV ke atas yang memenuhi standar kompetensi	-	-	98,22	98,29	99

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2017

2.4.34 Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Fungsi penunjang terkait penelitian dan pengembangan akan mempunyai kewenangan antara lain: melakukan penelitian daerah, merumuskan pengembangan dan inovasi daerah.

Persentase penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.108
Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	80

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tapin Tahun 2017

2.4.35 Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

1. Persentase tindak lanjut temuan

Persentase tindak lanjut temuan pengawasan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.109
Persentase Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	69,62	69,62	82,61	59,41	85

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2017

2.4.36 Sekretariat Dewan

Fungsi penunjang terkait sekretariat dewan mempunyai kewenangan antara lain: mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan.

Indikator yang akan digunakan atas Sekretariat Dewan adalah laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.110
Persentase Laporan Pertanggungjawaban
yang Tepat Waktu di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase laporan pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu	47	93	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2017

2.4.37 Sekretariat Daerah

1. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tapin.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKjIP Pemerintah Kabupaten Tapin beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.111
Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai SAKIP	C	C	C	CC	CC

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas Nilai SAKIP Kabupaten Tapin mendapatkan nilai C dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Sejak tahun 2015 mendapatkan peningkatan menjai nilai CC. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan target sasaran pembangunan secara akuntabel.

2. Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hasil EKPPD terhadap LPPD selama beberapa tahun terakhir yang berisi peringkat, skor, dan status kinerja Pemerintah Daerah disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.112
Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Peringkat/Skor /Status LPPD	-	Peringkat 135/Skor: 2,7027/Status : tinggi	-	Peringkat 127 / Skor: 3,0468 /Status: sangat tinggi	-

Sumber: www.otda.kemendagri.go.id

3. Jumlah Informasi Manajemen Pemda

Jumlah Informasi Manajemen Pemda adalah Jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemda yang bersangkutan. Jumlah Informasi Manajemen Pemda di Kabupaten Tapin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.113
Jumlah Informasi Manajemen Pemda
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Informasi Manajemen Pemda	4	4	4	4	4

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah informasi manajemen Pemda selama tahun 2012-2016 berjumlah tetap sebanyak 4 sistem informasi manajemen Pemda.

4. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tapin disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.114
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

INDIKATOR	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	75	75,76	74,39	74,87	75

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terus mengalami peningkatan dengan pencapaian akhir di tahun 2016 sebesar 75.

Capaian pembangunan dari beberapa aspek pembangunan telah diuraikan dengan dukungan data beberapa tahun terakhir. Data capaian pembangunan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.115
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Rp ribu	4.605.780	4.870.635	5.135.704	5.343.481	5.607.922	5.895.172	1.491.263.	melampaui (>)
1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Rp ribu	5.051.452	5.468.824	6.141.945	6.474.845	6.904.693	7.433.274	4.822.249.	melampaui (>)
1.2	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	%	6,32	5,75	5,44	4,05	4,95	5,12	5,61	belum tercapai (<)
1.4	Laju Inflasi Kabupaten Tapin	%	5,96	6,98	7,16	5,03	3,68	3,82	4,31	melampaui (>)
1.5	PDRB per kapita (ADHB)	Rp juta	29,05	30,99	34,28	35,61	37,43	39,82	25,76	
1.6	PDRB per kapita (ADHK)	Rp juta	26,49	27,60	28,66	29,40	30,39	31,58	7,8	melampaui (>)
1.7	Indeks Gini/Koefisien Gini	%	0,30	0,28	0,26	0,35	0,32	0,33	0,24	belum tercapai (<)
1.8	Persentase Penduduk Miskin	%	4,99	3,41	3,63	3,88	3,70	3,77	3,03	belum tercapai (<)
1.9	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jiwa	8,717	6,045	6,518	7,010	6,810	7,011	6.393	belum tercapai (<)
1.10	Garis Kemiskinan	Rp	268.641	295.353	314.696	330.033	369.153	390.488	461.135,2 6	belum tercapai (<)
1.11	Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	0,48	0,34	0,37	0,46	0,25	0,40	0,21	melampaui (>)
1.12	Indeks Keparahan Kemiskinan	%	0,08	0,05	0,06	0,08	0,03	0,08	0,01	belum tercapai (<)
1.13	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	65,92	66,48	66,99	67,67	68,05	68,70	69,72	belum tercapai (<)
1.14	Angka Melek Huruf	%	96,87	93,00	93,29	97,10	98,34	98,87	98,50	melampaui (>)
1.15	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	6,84	6,99	7,17	7,43	7,44	7,53	7,76	belum tercapai (<)
1.16	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	10,74	10,95	11,17	11,21	11,24	11,52	12,60	belum tercapai (<)
1.17	Angka Harapan Hidup	tahun	68,90	68,98	69,02	69,47	69,62	69,77	69,50	melampaui (>)
1.18	Jumlah Balita Gizi Buruk	jumlah	279	268	182	182	175	160	173	melampaui (>)



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,52	69,89	71,29	71,75	71,81	71,92	81,15	belum tercapai (<)
1.20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,69	5,24	1,79	5,14	4,71	4,39	5,48	melampaui (>)
1.21	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	65	94,76	98,21	94,86	95,28	95,61	98,95	belum tercapai (<)
1.22	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Poin	71,19	71,86	83,54	83,80	83,82	83,87	82,80	melampaui (>)
1.23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	75,39	71,60	72,76	72,88	72,91	72,99	72,50	melampaui (>)
1.24	Opini pengawas eksternal (BPK RI)	Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	sesuai (=)
1.25	Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan terhadap PDRB ADHB	%	18,22	17,39	17,60	18,87	19,58	19,88	19,85	melampaui (>)
1.26	Kontribusi sektor kehutanan PDRB ADHB	%	0,28	0,31	0,29	0,29	0,28	0,28	1	belum tercapai (<)
1.27	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHB	%	34,94	36,16	35,25	30,04	27,77	27,79	35,53	belum tercapai (<)
1.28	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB	%	7,83	7,97	8,33	8,99	9,56	9,86	5,45	melampaui (>)
1.29	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB	%	7,79	6,46	6,48	6,85	6,99	7,03	6,76	melampaui (>)
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	2,354,7 83.	2,615,6 30.	2,856,6 78.5	3,072,5 56.2	3,319,6 08.5	3,319,60 8.5	2,857,79 2	melampaui (>)
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp	1.315.7 15	1.454.6 06	1.584.8 22	1.713.1 70	1.872.0 55	1.931.0 80	1.515.7 30	melampaui (>)
3	Angka Kriminalitas	/10.000	18,53	17,81	16,52	15,62	11,94	16,93	16,50	belum tercapai (<)
4	Rasio Ketergantungan	%	46,72	47,69	47,56	47,43	47,25	47,31	47,30	belum tercapai (<)



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
B	ASPEK PELAYANAN UMUM									
I	Fokus Layanan Urusan Wajib									
1	Pendidikan									
1.1	APM:									
1.1.1	APM SD/MI	%	93,16	95,68	97,71	98,76	97,36	99,98	99,77	melampaui (>)
1.1.2	APM SMP/MTs	%	69,81	64,36	72,91	67,63	71,33	72,72	72,5	melampaui (>)
1.1.3	APM SMA/MA/SMK:	%	32,69	44,62	62,05	44,32	48,31	48,73	60,7	belum tercapai (<)
1.2	APK:									
1.2.1	APK SD/MI	%	104,47	108,81	110,52	111,14	111,63	110,30	95,62	melampaui (>)
1.2.2	APK SMP/MTs	%	84,55	79,52	82,45	82,81	85,78	85,70	92,50	belum tercapai (<)
1.2.3	APK SMA/MA/SMK	%	66,75	62,14	71,36	73,88	76,88	77,44	60,70	melampaui (>)
1.3	Angka Partisipasi Sekolah:									
1	Umur 7-12 tahun	%	98,42	98,00	100	98,76	99,98	99,98	105,50	belum tercapai (<)
2	Umur 13-15 tahun	%	63,83	82,06	94,99	87,13	92,02	92,49	87,66	melampaui (>)
1.3.2	Rasio Guru Terhadap Murid	%	99,03	96,91	88,40	91,53	85,70	99,03	44,50	melampaui (>)
1.4	Pendidikan Menengah									
1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah									
1	Umur 16-18 tahun	%	38,18	57,84	69,10	54,19	58,86	59,84	39,58	melampaui (>)
1.4.2	Rasio Guru Terhadap Murid	%	65,38	69,67	92,61	77,14	74,25	65,38	13,50	melampaui (>)
2	Kesehatan									
2.1	Angka Kematian Bayi	/1.000	17,8	20	23	18	17	16	16	sesuai (=)
2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	/1.000	982,2	980	977	972	973	873	984	belum tercapai (<)



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
2.3	Rasio Posyandu per satuan balita	%	16,42	10,77	10,70	10,77	10,90	10,90	69,83	belum tercapai (<)
2.4	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	/1.000	0,075	0,074	0,073	0,072	0,071	0,070	0,08	melampaui (>)
2.5	Rasio Pustu per satuan penduduk	/1.000	0,270	0,204	0,207	0,204	0,201	0,198	0,27	melampaui (>)
2.6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1.000	0,0058	0,0057	0,0056	0,0055	0,0054	0,0054	0,06	melampaui (>)
2.7	Rasio Dokter per satuan penduduk	/1.000	0,121	0,074	0,128	0,127	0,114	0,145	0,25	melampaui (>)
2.8	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	/1.000	3,25	2,87	3,02	2,98	2,95	3,40	3,81	melampaui (>)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	65	69,66	73,08	50,65	60	65	65	sesuai (=)
3.2	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	62	63	46,00	65,00	65,00	65,00	65	sesuai (=)
3.3	Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih	%	40,00	40,00	32,70	32,70	55,48	80	80	sesuai (=)
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	56,00	56,00	29,69	62,76	55,48	80	80	sesuai (=)
3.5	Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	%	0,48	0,48	0,79	0,81	1,17	1,17	59,38	belum tercapai (<)
3.6	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	11,00	11,00	11,00	29,96	29,96	29,96	29	melampaui (>)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
4.1	Persentase Rumah Layak Huni	%	90,00	90,00	91,57	92,23	97,18	97,18	95	melampaui (>)
4.2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	6,27	6,27	0,24	0,0068	0,0067	0,0067	0,0070	melampaui (>)
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat									



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
5.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	/10.000	4,53	4.14	5.92	5.78	5.70	5.70	5,00	melampaui (>)
5.2	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	/10.000	18,83	18,70	16,97	17,05	16,82	16,82	30,00	belum tercapai (<)
6	Sosial									
6.1	Jumlah PMKS penerima bantuan	jumlah	208	870	906	2,108	4,389	4,389	506	melampaui (>)
7	Tenaga Kerja									
7.1	Pencari kerja yang ditempatkan	%	12,21	12,21	30,24	48,41	49,00	49,00	39,6	melampaui (>)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
8.1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	10,41	10,41	11,18	11,17	9,43	9,43	2,95	melampaui (>)
8.2	Rasio KDRT	%	0,013	0,013	0,002	0,022	0,010	0,010	0,010	sesuai (=)
9	Pangan									
9.1	Ketersediaan Pangan Utama	%	91,19	87,34	112,56	110,94	151,13	152,71	100	melampaui (>)
10	Pertanahan									
10.1	Persentase Lahan Bersertifikat	%	0,40	0,40	0,85	0,85	1,17	1,52	2	belum tercapai (<)
11	Lingkungan Hidup									
11.1	Persentase Penanganan Sampah	%	19,21	19,21	20,28	42,00	47,18	67,02	60,00	melampaui (>)
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									
12.1	Persentase Kepemilikan KTP	%	86,68	86,68	85,07	85,07	94,00	95,00	95,00	sesuai (=)
12.2	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000	%	26	26,40	36,04	36,04	34,67	95	95,46	belum tercapai (<)
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
13.1	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
13.2	Jumlah LSM Aktif	%	5	5	8	3	3	3	5	belum tercapai (<)



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
14.1	Persentase PUS yang aktif ber -KB	%	-	84,71	87,68	87,64	82,43	82,43	82,43	sesuai (=)
15	Perhubungan									
15.1	Persentase Angkutan Darat	%	11,35	11,35	11,38	15,64	16,28	17,35	16,38	melampaui (>)
15.2	Jumlah KIR Angkutan Umum	jumlah	1.951	1.951	1.951	2.365	2.281	2.321	2.300	melampaui (>)
15.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	jumlah	2	2	2	2	2	2	2	sesuai (=)
16	Komunikasi dan Informatika									
16.1	Jumlah Pemancar Komunikasi	jumlah	4	33	33	33	33	33	33	sesuai (=)
16.2	Jumlah surat kabar	jumlah	8	8	6	9	6	6	8	sesuai (=)
16.3	Jumlah penyiaran radio	jumlah	7	13	13	13	13	13	13	sesuai (=)
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
17.1	Persentase Koperasi Aktif	%	81,56	81,69	81,69	81,69	81,69	81,69	83	belum tercapai (<)
17.2	Jumlah UKM non BPR/LKMUKM	unit	7.405	7.521	7.616	7.737	7.941	7.941	8.839	belum tercapai (<)
17.3	Jumlah BPR/LKM	unit	8	12	12	12	12	12	8	melampaui (>)
18	Penanaman Modal									
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	orang	0	0	2	6	7	2	2	sesuai (=)
18.2	Jumlah investor PMA	orang	3	1	3	9	9	2	2	melampaui (>)
18.3	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rp Juta	0	532	357	242	64	124	120	melampaui (>)
18.4	Jumlah Investasi PMA	Rp Juta	181	54	167	1.198	74	193	100	melampaui (>)
19	Kepemudaan dan Olahraga									
19.1	Jumlah Organisasi Kepemudaan	jumlah	12	43	43	43	43	43	43	sesuai (=)



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
19.2	Jumlah Organisasi Olahraga	jumlah	145	35	35	35	35	35	35	sesuai (=)
19.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	jumlah	12	10	10	10	10	10	10	sesuai (=)
19.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	jumlah	65	29	29	29	29	29	29	sesuai (=)
20	Statistik									
20.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
20.2	Buku PDRB Kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
21	Persandian									
21.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	0	0	0	0	0	0	0	sesuai (=)
22	Kebudayaan									
22.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	keg	11	11	12	15	16	16	8	melampaui (>)
22.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	keg	4	4	4	4	5	5	4	melampaui (>)
22.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	22	22	22	22	22	22	16	melampaui (>)
23	Perpustakaan									
23.1	Jumlah Perpustakaan	Buah	46	88	88	88	88	88	57	melampaui (>)
23.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	orang	12.391	40.426	13.336	17.234	20.337	20.337	18.670	melampaui (>)
II	Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1	Kelautan dan Perikanan									
1.1	Produksi Perikanan:									
1.1.1	Perikanan Rawa	ton	1.170.20	1.694.30	1.717.70	1.730.20	1.762.90	1.762.90	1.650.70	melampaui (>)
1.1.2	Perikanan Sungai	ton	4.534.20	2.970.60	2.997.40	3.063.50	3.272.90	3.272.90	2.772.50	melampaui (>)



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.2	Konsumsi Ikan	%	100,16	100,16	100,39	100,39	99,30	99,30	53.45	melampaui (>)
2	Pariwisata									
2.1	Jumlah Wisatawan	orang	350.550	362.563	362.563	428.662	428.662	428.662	364.000	melampaui (>)
3	Pertanian									
3.1	Produktivitas Padi/produksi	ku/ha	44,83	47,57	47,62	59,23	52,02	52,02	44,93	melampaui (>)
3.2	Produktivitas Karet	Kg/ha	518,00	720,40	596,01	530,65	594,50	594,50	0,97	melampaui (>)
III	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan									
1	Perencanaan									
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	%	100.00	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	sesuai (=)
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	%	100.00	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	sesuai (=)
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	%	100.00	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	sesuai (=)
2	Keuangan									
2.1	Penetapan APBD	Tepat/tidak tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	sesuai (=)
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
3.1	Persentase ASN eselon IV ke atas yang memenuhi standar kompetensi	persen	97,63	98,12	98,22	98,29	99	99	99	sesuai (=)
4	Penelitian dan Pengembangan									



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	80	80	80	80	80	80	80	sesuai (=)
5	Pengawasan									
5.1.	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	persen	-	69,62	82,61	59,41	85	85	85	sesuai (=)
6	Sekretariat Dewan									
6.1	Persentase laporan pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu	persen	47	93	100	100	100	100	100	sesuai (=)
7	Sekretariat Daerah									
7.1	Nilai SAKIP	Nilai	C	C	C	CC	CC	CC	B	
7.2	Peringkat/Skor/Status LPPD	Peringkat/S kor/Status	Peringkat 135/Skor: 2,7027/ Status: tinggi	Peringkat 135/Skor: 2,7027/ Status: tinggi	Peringkat 135/Skor: 2,7027/ Status: tinggi	Peringkat 127 / Skor: 3,0468 /Status: sangat tinggi	Peringkat 127 / Skor: 3,0468 /Status: sangat tinggi	Peringkat 127 / Skor: 3,0468 /Status: sangat tinggi	Peringkat 127 / Skor: 3,0468 /Status: sangat tinggi	sesuai (=)
7.3	Jumlah Informasi Manajemen Pemda	jumlah	4	4	4	4	4	4	4	sesuai (=)
7.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	75	75,76	74,39	74,87	75	76	76	sesuai (=)



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan. Sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Daerah berkewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Keuangan daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang berakibat pada meningkatnya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tapin. Keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan setiap tahun pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah atau



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapin, dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasarkan regulasi yang berlaku, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai melalui aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara beberapa tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2013-2017, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	829.461.453.751	937.151.136.913	1.173.544.232.220	1.128.327.657.014	996.083.590.562	5,7%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	37.272.418.207	55.569.634.311	61.674.874.249	57.163.594.658	84.828.562.754	25,3%
1.1.1.	Pendapatan Pajak daerah	8.209.996.415	16.832.594.123	13.614.263.374	11.436.782.853	18.143.603.420	32,1%
1.1.2.	Hasil Retribusi daerah	3.390.031.841	2.658.110.678	3.082.012.953	3.887.662.145	3.175.353.080	0,5%
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.231.357.211	4.730.429.355	6.319.470.012	5.165.507.637	5.585.203.169	17,5%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	22.441.032.740	31.348.500.155	38.798.403.767	36.673.642.024	57.924.403.085	29,0%
1.2	Dana Perimbangan	652.903.226.661	739.453.661.580	984.678.706.830	881.541.819.384	735.933.122.095	4,9%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	232.539.265.661	283.342.914.580	423.958.329.830	219.401.104.353	169.876.191.085	0,2%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	383.383.301.000	416.564.087.000	414.358.027.000	451.047.893.000	443.124.432.000	3,8%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	36.980.660.000	39.546.660.000	146.362.350.000	211.092.822.031	122.932.499.010	69,9%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	139.285.808.883	142.127.841.023	180.285.163.476	184.622.242.973	175.321.905.713	6,6%
1.3.1	Pendapatan Hibah	15.236.017.048	6.866.501.137	11.919.109.083	6.852.151.875	6.543.407.061	-7,1%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	63.623.841.544	71.611.533.066	64.214.182.393	54.259.824.796	62.335.212.702	0,4%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	46.087.163.000	-	-
1.3.4.1	- Tunjangan Profesi Pendidik/Guru	-	-	67.718.564.000	-	-	-
1.3.4.2	- Tambahan Penghasilan Guru	-	-	2.425.250.000	-	-	-
1.3.4.3	- Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Dana Desa Yang Bersumber dari APBN	-	-	-	76.292.716.000	96.938.641.000	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	7.268.671.291	8.868.682.820	34.008.058.000	1.130.387.302	2.004.644.950	71,5%
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	5.000.000.000	7.500.000.000	-
	Total Pendapatan	829.461.453.751	937.151.136.913	1.173.544.232.220	1.128.327.657.014	996.083.590.562	5,7%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013-2017



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat yaitu periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 5,7%. Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung meningkat dari periode tahun 2013-2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,3%. Secara persentase, pertumbuhan masing-masing komponen PAD berbeda-beda.

Sumber utama pendapatan Kabupaten Tapin berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum. Dana Perimbangan setiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2013-2017 terakhir sebesar 4,9%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 69,9%, Selain dari PAD dan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata-rata pertumbuhan 71,5%.

b) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2013-2017 bahwa realisasi belanja mengalami pertumbuhan rata rata sebesar 6,46%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,00%. Belanja Tidak Langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,62%. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi sebesar 3,42%. Komponen Belanja Langsung terbesar digunakan untuk belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 36,27%.



Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017

Kode	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	BELANJA	841.882.825.507	892.848.890.983	1.244.530.368.789	1.178.113.475.949	1.047.991.304.652	7,27%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	366.559.085.332	408.288.800.515	560.085.693.098	567.050.405.024	565.431.664.515	12,38%
2.1.1	Belanja Pegawai	325.567.475.610	357.238.465.424	397.383.804.515	413.968.348.010	386.051.407.431	4,60%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	12.488.544.000	17.226.798.600	46.070.851.659	7.550.753.000	14.079.897.750	52,06%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.990.544.000	2.823.620.000	2.896.660.000	2.855.120.000	3.088.800.000	12,80%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	783.081.511	851.904.176	1.019.368.499	1.277.198.493	1.532.180.493	18,43%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	388.850.000	396.304.400	111.999.056.334	141.197.430.771	160.121.191.800	7050,56%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	383.015.000	287.681.546	715.952.091	201.554.750	558.187.041	57,27%
	Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)	24.957.575.211	29.464.026.369	-	-	-	-
	Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi	-	-	-	-	-	-
2.2	BELANJA LANGSUNG	475.323.740.175	484.560.090.468	684.444.675.691	611.063.070.925	482.559.640.137	2,86%
2.2.1	Belanja Pegawai	21.563.507.920	19.859.551.013	27.392.890.139	23.693.511.299	27.814.891.715	8,48%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163.120.611.186	210.824.741.328	218.076.617.439	248.998.849.893	261.266.430.175	12,95%
2.2.3	Belanja Modal	290.639.621.069	253.875.798.126	438.975.168.113	338.370.709.733	193.478.318.247	-1,37%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2013-2017

**c) Pembiayaan**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Tapin terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel 3.3 menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Tapin. Memperhatikan Tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 3949,64%. Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata penurunan sebesar 0,05%. Komponen Pengeluaran Pembiayaan yang penurunannya signifikan dari penyertaan modal dengan rata-rata penurunan sebesar 0,30%.